

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena perkawinan sebagai sarana untuk dibentuknya keluarga dan kodrat manusia juga untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, perkawinan mengandung unsur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.<sup>1</sup> Yang dimana dapat dibuktikan semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, dalam hal ini menurut Islam dan sesuai dengan yang dikatakan oleh al-Qur'an pada QS An-Nisa ayat 21 bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan telah ditentukan oleh Allah SWT untuk hidup bersama, guna mencapai masyarakat yang mulia. Dengan keadaan rumah tangga yang tidak stabil, dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak yaitu suami dan istri dan dapat berakhir dengan perceraian. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Imam an-Nawawi, beliau mendefinisikan nikah sebagai bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV.Mitra Utama, hlm. 29.

<sup>2</sup> Rizem Aizid, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, hlm.45.

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah sebuah perkara yang sangat sulit dilalui oleh kedua belah pihak suami dan istri. Dalam pandangan islam tidak menghendaki adanya perceraian, akan tetapi bila kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah dilakukan berbagai usaha tidak memperoleh jalan keluar maka barulah Islam membolehkan suami istri kedua belah pihak tersebut untuk bercerai.<sup>3</sup> Perceraian di Negara Indonesia berada pada payung Hukum Indonesia yang dimana adalah hukum Islam, yang secara masih pada Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam Hukum Perdata perceraian sendiri merupakan penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.<sup>4</sup> Dan proses beracara mendukungnya mewajibkan jalan penyelesaian secara tuntas tanpa menimbulkan akibat hukum di kemudian hari yang sangat panjang. Sementara dalam islam mengenal istilah talak, dimana secara umum talak ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya. Secara khusus talak merupakan perceraian yang dijatuhkan pihak suami.<sup>5</sup>

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai ketentuan hukum materiil untuk hakim di Pengadilan Agama dalam

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 10.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1982, Bandung : Intermasa, hlm. 42.

<sup>5</sup> R. saija & Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, hlm.165

memutus perkara perdata yang dimana perceraian di dalamnya. Perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri

Dalam ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian sendiri dapat dilakukan melewati gugatan pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian hak-hak dan kewajiban akan terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan hal ini menyelesaikan perkara melewati jalur pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan hukum perdata. Hukum islam juga memberikan jalan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan jalan talak, sedangkan jika istri yang menghendaki untuk menceraikan suami melalui jalan khulu'.<sup>6</sup> Sebagaimana demikian perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas kemauan istri disebut Gugat Cerai dan sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan pengadilan.

Mengajukan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami istri telah menandai bahwa perceraian dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara yang dapat dijatuhkan oleh masing-masing

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, hlm 220

pihak, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan proses berjalan dengan mudah. Kehadiran kedua belah pihak sangat penting dalam persidangan tetapi ada hal yang lebih penting yaitu posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Hakim memegang asas kewajiban untuk mendamaikan pihak yang berperkara yang harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam.<sup>7</sup> Hakim disini memiliki posisi yang sangat penting, dimana hakim harus mendengarkan kedua belah pihak ketika dipanggil dimuka sidang.

Peran hakim dalam persidangan perceraian sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk diputusnya suatu perkara sesuai aturan. Dalam hal ini Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Pada saat kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan hukum yang tepat. Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dan dalam hal ketidakhadiran inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah *verstek*.<sup>8</sup> *Verstek* sendiri tidak terlepas dari fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya salah satu pihak yang bersengketa.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 215

<sup>8</sup> R. Supono, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradya Paramita, hlm 33

*Verstek* dapat dikatakan pula apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan daengan adanya sebab untuk ketidakhadiran tersebut maka demi kepastian hukum, cara cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip, perkara tetap dapat di selesaikan.<sup>9</sup> Sementara Putusan *Verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan dikarenakan tergugat tidak hadir, dimana putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya perlawanan (*verzet*).<sup>10</sup>

Adapun tujuan atau hal pokok dalam acara *verstek* yakni mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.<sup>11</sup> Ada beberapa syarat terkait putusan *verstek*, diantaranya yaitu :

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak diwakilkan orang lain atau mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya karena alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan
- d. Penggugat memohon keputusan.

Selain itu *verstek* dalam perkara perceraian juga memiliki pokok permasalahan lainnya pada hal pembuktian. Dimana dalam Hukum Acara

---

<sup>9</sup> Roihan A. Rosyid, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 102-103

<sup>10</sup> Sovia Hasanah, 2018, *Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir*, HukumOnline.com diakses pada hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 11.03 WIB.  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it5aaf18303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir/>

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 383

dapat dibagi menjadi dua hal yaitu Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formiil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama dan dapat pula dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil.<sup>12</sup>

Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>13</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Huku Perdata*, Bandung : intermasa, hlm 176

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salah satu alasan yang dapat melakukan perceraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>14</sup> Dalam hal tersebut dapat dikatakan atau disebut sebagai *mafqud*. *Mafqud* menurut istilah yaitu orang yang pergi dari tempat asalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.<sup>15</sup>

Tidak adanya suami karena meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri bisa menimbulkan dampak dan masalah bagi isteri. Pihak isteri merasa haknya teraniaya dan ada tekanan lahir batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merasa ditelantarkan oleh suami, jadi Hukum Islam memberikan jalan keura untuk mengadukan hal tersebut kepada haki Pengadilan Agama duna memperoleh keadilan dan penyelesaiannya yang baik.

Adapun istri memiliki hak untuk mengajukan gugatanceraai ke Pengadilan Agama dengan alasan :

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita pengakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>15</sup> Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, hlm 214

4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya
5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami
6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama.<sup>16</sup>

Menurut uraian diatas dapat dikatakan jika suami Mahfud atau hilang, maka isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi dalam hal suami Mahfud atau suami hilang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Artinya, jika suami berturut-turut meninggalkan isteri selama 2 tahun, maka pihak isteri dapat melakukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama setempat dan pengadilan mengbulkan gugatan perceraian tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di Pengadilan Agama Surakarta terdapat perceraian akibat suami hilang atau Ghoib. Isi gugatan menyebutkan bahwa seorang isteri melakukan gugatan cerai kepada suami yang pergi meninggalkan istri tanpa adanya izin dan alasan yang sah, dan selain selama suami tidak pulang, suami tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa lamanya kepergian suami yaitu 1 tahun 5 bulan.

---

<sup>16</sup> Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, hlm 10



Proses penyelesaian perkara cerai gugat tersebut, hakim Pengadilan Agama Surakarta melalui keterangan beberapa saksi telah menemukan bahwa selain suami Ghoib, juga terdapat adanya unsur tidak memberi nafkah dan terdapat juga pelanggaran ta'liq talak sehingga hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan telah memberikan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat karena hakim menganggap adanya unsur pelanggaran taklik talak.

Pada dasarnya hasil putusan hakim tersebut tidaklah sesuai dengan maksud gugatan yang telah diajukan oleh pihak berperkara sehingga penulis ingin menganalisa putusan tersebut dengan penelitian berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAH YANG TERGUGTNYA GHAIB ( Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska ).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perceraian melalui *verstek* di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim pada perceraian akibat suami Ghaib di Pengadilan Agama Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perceraian melalui *verstek* di Pengadilan Agama Surakarta

2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat suami Ghaib di Pengadilan Agama Surakarta

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

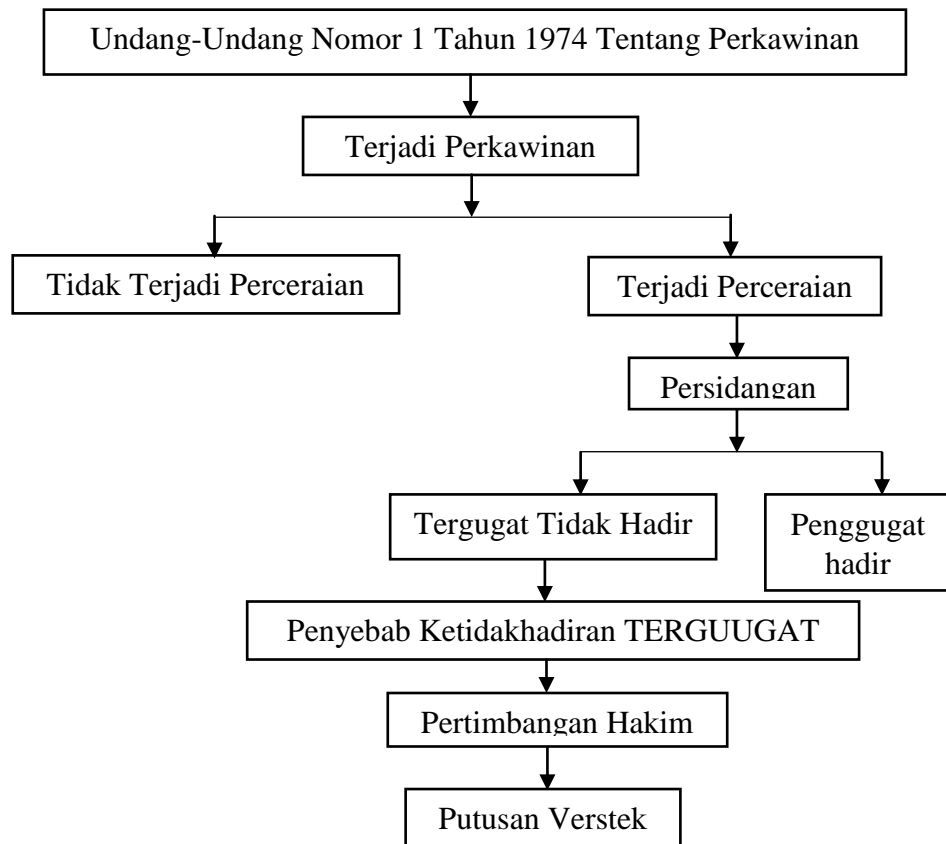
1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta referensi di bidang Hukum Islam khususnya tentang perceraian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi maupun pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai perceraian, serta proses pengajuan di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat dapat memikirkan kembali perlukah melakukan perceraian ataupun pandangan lain terhadap perceraian.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana di dalamnya tidak semuanya perkawinan akan berjalan mulus selamanya. Ada kesalahan atau putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh adanya perceraian, dan dalam perceraian memiliki macam macam alasan yang mendasar, dan alasan tersebut digunakan seseorang untuk bercerai. Dengan adanya perceraian tersebut akan diadakannya agenda persidangan dimana suatu perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama setelah melalui proses seperti pendaftaran, pemberian nomor perkara, penetapan Majelis

Hakim, penetapan hari sidang sampai proses pemanggilan para pihak baru akan tibanya pada hari sidang.

Dalam persidangan akan menimbulkan beberapa kemungkinan, seperti para pihak hadir dipersidangan dan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu ketidakhadiran salah satu pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak tergugat, sehingga ketidakhadiran tergugat di persidangan disebabkan oleh beberapa alasan yang dalam penelitian ini, ketidakhadiran tergugat itulah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Suatu perkara perceraian yang dimana tergugatnya tidak hadir sedangkan pihak penggugat hadir maka dimohonkan putusan proses pemeriksaan harus tetap berjalan.

Disini Hakim sebagai pejabat yang berwenang memutus perkara. Hakim memberi putusan dalam perkara tersebut dilandasi dengan beberapa pertimbangan berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan berlandaskan pasal 125 HIR. Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut ialah Putusan *verstek*, merupakan suatu putusan yang dikeluarkan atau dijatuhkan karena Tergugat atau pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut dan resmi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Adapun metode Penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan Penulis adalah Yuridis Normatif yaitu melihat hukum sebagai norma sehingga dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif yang memberikan gambaran-gambaran mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian melalui *verstek* di Pengadilan Agama Surakarta dikaitkan dengan Perundang – Undangan dan teori – teori hukum yang sesuai dengan objek penelitian.

#### 3. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan sumber Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari : Hasil karya ilmiah sarjana, Hasil penelitian, serta literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

#### 4. Metode Pengumpulan data

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 35.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah dengan mempelajari sebagai literatur, buk, artike, jurnal, maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini berupa metode analisis Kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dengan mengungkapkan makna serta mnejelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam.

### **G. Sistematika penulisan**

Guna mempermudah penulisan penelitian serta untum memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang Pengertian perkawinan, Pengertian perceraian, Sebab-sebab putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, sebab diputuskannya putusan verstek, syarat-syarat hakim memutuskan putusan verstek, hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN berisi tentang analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian, yang

dimana analisisnya yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan *verstek* dan analisis putusan hakim terhadap perceraian dengan tergugatnya ghaib atau *mafqud*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutup penulisan ini.